



APBD 2016, Perda vs Pergub

Rencana Penyertaan Modal BUMD Diprediksi Ganggu Pembangunan

BULAN Juli 2015 merupakan batas waktu penyelesaian input e-budgeting untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016. Apabila proses tersebut tidak rampung, maka anggaran tahun depan akan bernasib sama dengan APBD 2015, yakni terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif terkait pelaksanaan e-budgeting.

Melihat kondisi ini, sejumlah pihak berharap pada 2016, Pemprov DKI tidak lagi menggunakan peraturan gubernur (pergub) untuk pelaksanaan APBD. Melainkan menggunakan peraturan daerah (perda). Bila menggunakan pergub, berarti kembali pada APBD sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan pendapatan dan belanja daerah.

"Hal itu tentu sangat merugikan masyarakat yang sudah membayar pajak. Namun pajak tersebut tidak bisa digunakan untuk membangun Jakarta, karena terbentur ketentuan pergub yang menggunakan APBD lama," ujar Ketua Presidium Jakarta Budget Watch (JBW) S Andyka, kemarin (23/6).

Ia berharap, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta bisa duduk bersama membahas APBD 2016. Sehingga kepentingan masyarakat luas bisa terakomodasi. Kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan APBD. "Untuk itu diperlukan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif terkait e-budgeting. Sehingga tidak muncul kembali

kata-kata atau alasan eksekutif tidak menyosialisasikan e-budgeting, dan juga DPRD tidak memahami e-budgeting," kata Andyka.

Menurut Andyka, APBD DKI 2016 mendatang bisa menyentuh angka di atas Rp 80

triliun. Meski demikian, ia mengkritisi rencana Pemprov DKI untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Sebab kalau APBD sebesar itu dialokasikan untuk BUMD, maka pembangunan infrastruktur dan sosial di ibukota bakal terganggu. "Penyertaan modal yang terlalu besar pada BUMD, terkesan sebagai bentuk keputusan pemprov untuk menyerap APBD," sindir dia.

Karena itu, dirinya berharap selayaknya legislatif bisa mengambil peranannya dalam melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi kontrol, agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Gubernur Ahok mengaku ingin menggunakan perda pada APBD 2016, dengan syarat DPRD tidak kembali berubah dengan bermain proyek APBD melalui Pokir. Bila dewan tidak mau 'insaf' pada pembahasan APBD Perubahan 2015, dirinya akan terus menerapkan pergub hingga akhir masa jabatannya di 2017. "Kita siap-siap anggaran 2016 pergub lagi," terang Ahok. (wok)

APBD 2015

- ✓ Sebesar Rp 73 triliun
- ✓ Cukup waktu untuk memaksimalkan kinerja SKPD dan UKPD menyerap anggaran
- ✓ Gubernur berani bersikap tegas dan beri sanksi ke SKPD dan UKPD yang lamban dan takut melaksanakan kegiatan

APBD 2016

- ✓ Diprediksi sebesar Rp 80 triliun
- ✓ APBD Perubahan bisa dilaksanakan secepatnya
- ✓ Sorotan terhadap rencana penyertaan modal ke BUMD Rp 7,5-10 triliun.